

**ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN  
INFLASITERHADAP KESEMPATAN KERJA  
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR  
DAN SEDANG DI JAWA TENGAH  
(35 KAB/KOTA)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**PAUL SP HUTAGALUNG**  
**NIM. C2B006050**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2013**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Paul SP Hutagalung

Nomor Induk Mahasiswa : C2B006050

Fakultas / Jurusan : Ekonomika / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUHUPAH MINIMUM DAN  
INFLASITERHADAP KESEMPATAN KERJA  
INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR DAN SEDANG  
DI JAWA TENGAH (35 KAB/KOTA)**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Purbayu B Santosa, MS

Semarang, 20 Agustus 2013

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. Purbayu B Santosa, MS)  
NIP. 195809271986031019

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Paul SP Hutagalung  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006050  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika / Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUHUPAH MINIMUM  
DAN INFLASITERHADAP KESEMPATAN  
KERJA INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR  
DAN SEDANG DI JAWA TENGAH (35  
KAB/KOTA)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Agustus 2013**

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Purbayu B Santosa, MS ( ..... )

2. Drs. H. Edy Yusuf AG, M.Sc, Ph.D (..... )

3. Fitrie arianti, SE, M.Si (. ..... )

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Paul SP Hutagalung, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar Dan Sedang Di Jawa Tengah (35 Kab/Kota)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Agustus 2013  
Yang membuat pernyataan,

Paul SP Hutagalung  
NIM : C2B006050

## **ABSTRACT**

*Two important indicators of a country's economic development lies in the high economic growth and increased employment opportunities. Approach of an economic growth is mostly done in several areas to develop sectors of the regional economy, which is expected to open up more employment opportunities. Therefor, must be known what factors affected the increase in employment opportunities and how it's influence.*

*The research aims to determine how much the influence about minimum wage and inflation to the large and medium manufacturing industries in central java (35 districts / cities). The analytical method in this research is Ordinary Least Square, where Y refers to variable of job opportunities, X1 refers to minimum wage and X2 refers to inflation.*

*The research showed that the determinant coefficient (R<sup>2</sup>) of 0,161 which means that employment's variation is affected by in the independent variable is equal to 16,1%. Based on the Partial Test, minimum wage were significantly influence to the employment opportunities which seen from the probability value of 0,000 and using degree of trust in amount of 0,05 with F-statistic equal of 4,637 and it means that if minimum wage rised, so the employment opportunities in the district / town in Central Java increased. Variable inflation did not affect the employment opportunities seen from profitabilitas value more than 0,05 is equal to 0,463 for inflation. Moreover, T-statistic in the amount of 0,753 was smaller than T table that indicates the alternative hypothesis was rejected. Based on Simultaneous Test (statistic F test) obtained F-statistic value in the amount of 10,963 and sig = 0.000 < 5%. This means, independent variable (minimum wage and inflation) affected dependent variable.*

*Keywords: employment opportunities, minimum wage and inflation.*

## ABSTRAK

Dua indikator penting pembangunan ekonomi suatu negara terletak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah, yang diharapkan dapat membuka peluang kesempatan kerja lebih banyak. Untuk itu harus diketahui apa saja faktor yang mempengaruhi peningkatan kesempatan kerja dan seberapa besar pengaruhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Tengah (35 Kab/Kota). Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah persamaan regresi dengan metode regresi kuadrat kecil atau Ordinary Least Square (OLS), dimana Y menunjuk pada variabel Kesempatan kerja, X1 variabel upah minimum dan X2 variabel inflasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,161 yang memberikan arti bahwa variasi kesempatan kerja dipengaruhi oleh variabel Independen sebesar 16,1%. Berdasarkan Uji Parsial Variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,05 Dengan t hitung sebesar 4,637 dan artinya jika upah minimum naik maka kesempatan kerja di kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat. Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja dilihat dari nilai probabilitas lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0.463. Untuk variabel Inflasi nilai t hitung sebesar 0,753, untuk lebih kecil dari t tabel maka mengindikasikan hipotesis alternatif ditolak. Berdasarkan Uji Simultan pada tabel Anova diperoleh nilai F hitung sebesar 10.963 dan sig = 0,000 < 5 % ini berarti, variabel independen (Upah Minimum dan Inflasi) mempengaruhi variabel dependen yaitu kesempatan kerja.

Kata kunci : kesempatan kerja, upah minimum dan inflasi.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Roma 12 : 12

“ Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,  
bertekunlah dalam doa “

*\_Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat  
buahnya; hidup di tepi jalan dan  
dilempari orang dengan batu, tetapi  
dibalas dengan buah.\_*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

*Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ku yang telah menebus aku.*

*Kedua orang tua ku dan segenap keluarga yang mensupport aku dan  
tidak lupa kepada kekasihku yang diberikan Tuhan yang selalu  
mendoakan, mendukung dan memberiku semangat.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya yang berlimpah penulis dapat menyelesaikan segala proses studi di Universitas Diponegoro serta menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM DAN INFLASI TERHADAP KESEMPATAN KERJA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR DAN SEDANG DI JAWA TENGAH (35 KAB/KOTA)”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, kerja sama, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Moh. Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Hadi Sasana, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Purbayu Budi Santosa, MS selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, koreksi dan saran yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Banatul Hayati, SE, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang pertama. Saya mendoakan semoga ibu cepat pulih dari sakit.



5. Bapak Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP selaku dosen wali yang telah banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
6. Para Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro.
7. Mbak Sekar dari ruang dosen yang telah berbaik hati membantu saya selama ini.
8. Para Staf Tata Usaha dan pegawai Fakultas Ekonomi yang turut serta dalam membantu kelancaran selama penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro.
9. Kedua orang tua, Pdt (emer) SMT Hutagalung, STh dan R. Tobing, SPd yang senantiasa sabar menunggu saya untuk sidang dan selalu memberikan materi, dukungan, motivasi dan doa.
10. Abang Binsar Hutagalung, SH dan keluarga di Solo yang telah membiayai perkuliahan dan menjadi tempat saya nomaden. Biarlah kiranya Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua.
11. Abangku David, Salomo, Johannes, Joshua serta adikku yang imut Setia Hutagalung yang turut membantu dan mendoakan saya dari luar pulau Jawa.
12. Veronika Sitompul, Amd.Keb terimakasih sudah menjadi bagian dari hidup saya selama ini dan bantuanmu selama ini. Saya berhutang banyak padamu atas terlaksananya skripsi saya.
13. Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) FEB Undip yang telah menjadi tempat saya bernaung di dalam kerohanian, terimakasih untuk jumatannya selama ini.

14. Teman-teman KKN Undip 2010 “Desa Bedono”, Kabupaten Demak. Terimakasih sudah berbagi pengalaman , memberi semangat dan dukungan.
15. PNS di lingkungan Dinas kertransduk dan pegawai Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah
16. Seluruh teman-teman seperjuangan IESP Undip 2006 yang beredar dari sabang sampai merauke. Terimakasih buat pertemanannya selama ini.
17. Seluruh pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan, semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini, maupun dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian dimasa datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 27 Agustus 2013

Penulis,

(Paul SP Hutagalung)  
C2B006050

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	15
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	16
1.4 Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan.....	18
2.1.1.1 Permintaan Tenaga Kerja.....	20
2.1.1.2 Penawaran Tenaga Kerja .....	20
2.1.1.3 Fungsi Produksi.....	21
2.1.2 Kesempatan Kerja.....	21
2.1.3 Upah Tenaga Kerja .....	23
2.1.3.1 Pengertian Upah.....	23
2.1.3.2 Fungsi Upah Minimum .....	25

2.1.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum .....	25
2.1.4 Inflasi .....	26
2.1.4.1 Pengertian Inflasi .....	26
2.1.4.2 Penggolongan Inflasi.....	27
2.1.5 Investasi .....	35
2.1.5.1 Pengertian Investasi .....	35
2.1.6 Hubungan Antara Variabel Dependen Terhadap Variabel Independen .....	36
2.1.6.1 Hubungan Upah Terhadap Kesempatan Kerja .....	36
2.1.6.2 Hubungan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja....	38
2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	43
2.4 Hipotesis .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	46
3.1.1 Variabel Penelitian.....	46
3.1.2 Definisi Operasional .....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	48
3.4 Metode Analisis .....	48
3.4.1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik .....	50
3.4.2 Uji Statistik.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	56
4.1.1 Keadaan Geografis Jawa Tengah.....	56
4.1.2 Keadaan Perekonomian Jawa Tengah.....	58
4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah.....	59
4.1.4 Perkembangan Kesempatan Kerja Sektor Industri Di Jawa Tengah.....	62
4.1.5 Perkembangan Upah Di Jawa Tengah .....	64
4.2 Analisis Data.....	66

4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	66
4.2.1.1 Uji Normalitas.....	67
4.2.1.2 Uji Multikolinearitas.....	68
4.2.1.3 Uji Heterosidasitas.....	69
4.2.1.4 Uji Autokorelasi.....	71
4.2.2 Hasil Analisis Regresi.....	73
4.2.2.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	74
4.2.2.2 Uji Statistik F.....	74
4.2.2.3 Uji Statistik T.....	75
4.3 Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010.....	5
Tabel 1.2	Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2010.....	9
Tabel 1.3	Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 .....	12
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 4.1	Laju Pertumbuhan PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2010.....	60
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas.....	67
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	70
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi .....	72
Tabel 4.6	Hasil Analisis Regresi.....	73
Tabel 4.7	Hasil Uji Statistik F.....	74

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Di 6 Provinsi Di Pulau Jawa .....	2
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2010 .....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	44
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Durbin-Watson.....	51
Gambar 4.1 Perkembangan Kesempatan Kerja Sektor Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011 .....	63
Gambar 4.2 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980- 2011 .....	65
Gambar 4.3 Sebaran Plot Pada uji Normalitas Data .....	68
Gambar 4.4 Scatter Plot Pada Uji Heteroskedastisitas.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Data Mentah .....	86
Lampiran 2 Hasil Logaritma Natural .....	89
Lampiran 3 Hasil Pengolahan Data .....	92
Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian .....	97



# **BAB I**

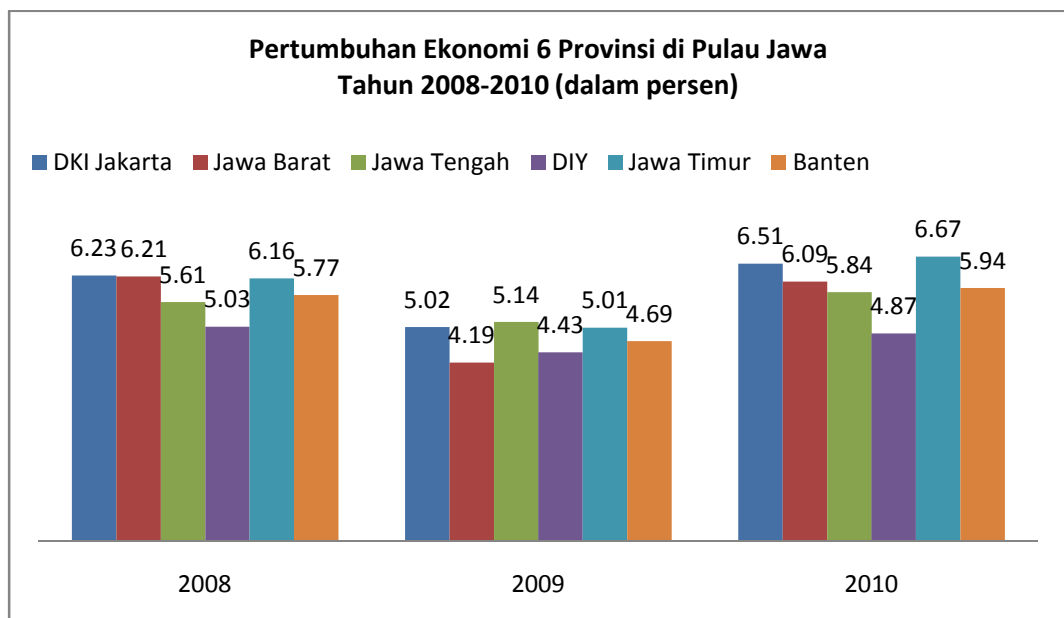
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dua indikator pembangunan ekonomi penting suatu negara terletak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di beberapa daerah dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat membuka peluang kesempatan kerja lebih banyak. Landasan teoritis yang memperkuat argumen ini adalah model pertumbuhan Harrod-Domar yang didasarkan pada prinsip-prinsip neoklasik dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator adanya kenaikan tingkat kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja sebagai akibat efek multiplier dan efek penetasan ke bawah (*tricklingdown effect*) dari tambahan atau perluasan investasi. (Astuti dan Handoko, 2007). Tujuan utama dari pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, juga mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan menciptakan kesempatan kerja. Dengan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi masyarakat, diharapkan pendapatan masyarakat akan turut meningkat. Pendapatan perkapita yang tinggi akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan, baik pembangunan nasional maupun regional (Arsyad dalam Suhartono, 2011).

Faktor yang berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya ditinjau secara nasional dan secara wilayah/daerah. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Persoalan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) telah mendapat perhatian yang besar sejak munculnya ilmu ekonomi. Menurut Nanga (dalam Fretes, 2007) pertumbuhan ekonomi dibutuhkan dan merupakan sumber utama peningkatan standar hidup (*standard of living*) penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan kata lain, kemampuan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan standar hidup penduduknya adalah sangat bergantung dan ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya (*long run rate of economic growth*).

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Di 6 Provinsi Di Pulau Jawa**



sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010

Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Tengah (5,14%), menyusul DKI Jakarta (5,02%) dan Provinsi Jawa Timur (5,01%). Tahun 2010, Jawa Timur merupakan Provinsi di Pulau Jawa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara provinsi lainnya, yaitu sebesar 6,67% diikuti DKI Jakarta (6,51%), Jawa Barat (6,09%) dan Jawa Tengah (5,84%).

Pada tahun 2010 berdasarkan angka sementara yang diperoleh dari publikasi BPS diketahui bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 5,84% (urutan kelima) dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,10%.

Pembangunan industri diarahkan untuk kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, menaikkan pangsa pasar dalam dan luar negeri dan selalu memelihara kelestarian lingkungan hidup, juga diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dengan saling keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor, meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus mendorong berkembangnya kegiatan berbagai sektor lainnya (Nurimsjah dalam Jumri, DKK, 2005).

Setiap pembicaraan mengenai ketenagakerjaan pasti menyangkut penduduk karena penduduk adalah sumber tenaga kerja. Khusus mengenai Indonesia masalah kependudukan timbul dalam jumlahnya yang besar, laju pertumbuhannya yang relatif tinggi, komposisinya yang kurang menguntungkan, dan distribusinya yang sangat timpang (Soelistyo, et al dalam Haryo Kuncoro, 1999).

Proses penyerapan tenaga kerja dengan peningkatan *output* memerlukan waktu. Namun sejalan dengan pertumbuhan pencari kerja yang masih tinggi serta tekanan ekonomi yang makin berat pada negara berkembang, ternyata penyediaan lapangan kerja baru belum cukup untuk bisa menyelesaikan permasalahan pertumbuhan pengangguran. Perluasan industri guna meningkatkan *output* tidak dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja.

Jhingan (dalam Sri Kusreni, 2009) berpendapat bahwa jumlah penduduk yang besar tidak otomatis menjadi modal pembangunan, bahkan dapat menjadi beban pembangunan. Ada dua masalah tenaga kerja di negara-negara berkembang, yaitu: pertama, kekurangan keterampilan kritis yang dibutuhkan sektor industri dan kedua, mempunyai tenaga kerja yang surplus. Peningkatan potensi sumber daya manusia, pendidikan, keahlian/keterampilan tenaga kerja bagi berhasilnya pembangunan itu penting. Tidaklah cukup jumlah penduduk secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas. Pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara. Pembentukan modal manusia berkaitan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif.

**Tabel 1.1**  
**Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2010**

Kelompok Umur Age Group	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	1.395.222	1.395.223	2.711.271
5-9	1.451.901	1.377.463	2.829.364
10-14	1.529.409	1.445.723	2.975.132
15-19	1.396.945	1.315.854	2.712.799
20-24	1.153.174	1.192.063	2.345.777
25-29	1.269.389	1.318.987	2.588.376
30-34	1.249.893	1.279.398	2.529.291
35-39	1.193.061	1.229.691	2.422.752
40-44	1.181.798	1.237.565	2.419.363
45-49	1.075.720	1.122.667	2.198.387
50-54	936.893	937.424	1.874.317
55-59	739.978	687.457	1.427.435
60-64	485.944	538.874	1.024.818
65-69	401.455	467.238	868.693
70-74	299.511	386.369	685.880
75+	330.802	438.166	768.968
TT	17	17	34
Jumlah/Total			
2009(1)	16.123.190	16.741.373	32.864.563
2008(1)	16.192.300	16.434.100	32.626.400
2007(1)	16.064.122	16.316.157	32.380.279
2006(2)	16.054.473	16.123.257	32.177.730

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : 1) Proyeksi SUPAS 2005

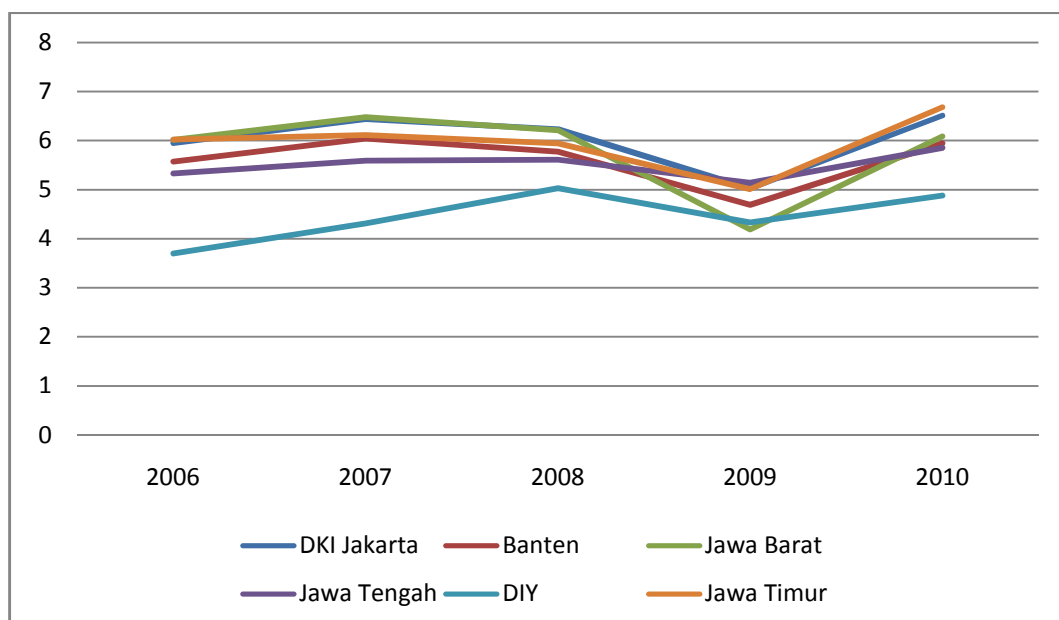
2) SUSENAS

Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah penduduk di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Tahun 2010 penduduk Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah penduduk dari tahun 2009 sebesar 482.906 jiwa menjadi 32.382.657 jiwa.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan dan setengah pengangguran yang dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Dari tabel diatas dapat diketahui penduduk usia 15-19 tahun pada tahun 2010 sebesar 2.712.799 jiwa dan batas usia kerja yaitu 60-64 tahun sebesar 1.024.818 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Hal ini hanya bisa didapat melalui peningkatan *output agregat* (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. Di dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan dalam Soebagyo,2007).

**Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2006-2010 (persentase)**



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2013.

Gambar 1.2 memperlihatkan laju pertumbuhan PDRB 6 provinsi di Pulau Jawa. Tahun 2006 PDRB provinsi Jawa Tengah berada pada angka 5,33%, kemudian naik pada tahun 2007 sebesar 5,59%, dan pada tahun 2008 sebesar 5,61%. Krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 yang berimbas terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan terjadinya penurunan laju PDRB di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,14% di tahun 2009. Namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,70% menjadi 5,84% (urutan ke-5 dari 6 provinsi di Pulau Jawa).

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Oleh sebab itu, apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa yang hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga barang dan jasa itu tidak dapat dikatakan inflasi. Semua negara di dunia selalumengalami permasalahan inflasi. Oleh karena itu, inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi negara tersebut.

Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4 persen dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya tingkat inflasi yang berada pada 7 sampai 10 persen dikatakan inflasi yang tinggi. Namun demikian, ada negara yang menghadapi tingkat inflasi yang lebih serius atau sangat tinggi, misalnya Indonesia pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi 650 persen. Inflasi yang sangat tinggi tersebut dinamai hiper inflasi (*hyper inflation*) (P Eko Prasetyo, 2009).

Berdasarkan faktor-faktor penyebab inflasi maka ada tiga jenis inflasi yaitu: inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*), inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena pengaruh impor (*imported inflation*).

Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada barang yang ditawarkan maka terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan, sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga yang terus menerus.

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan *output* dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi. Ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Inflasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa akhirnya juga akan naik, akibatnya permintaan/konsumsi barang dan jasa akan turun dan akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang



dibutuhkan. Hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran terbuka sehingga inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat pengangguran (Sukirno, 1994).

**Tabel 1.2**  
**Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2010**

Tahun	Inflasi (persen)
2000	8,57
2001	13,81
2002	11,52
2003	4,45
2004	5,75
2005	15,97
2006	6,50
2007	6,24
2008	9,55
2009	3,32
2010	6,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. 2011

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa inflasi di Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Inflasi pada tahun 2000 di Provinsi Jawa Tengah berkisar antara 8,57%, kemudian meningkat pada tahun 2001 menjadi 13,81%. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 berimbas terhadap perekonomian nasional dan daerah. Pada tahun 2008 terjadi kenaikan inflasi sebesar 9,55%. Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 9,55%. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi sebesar 3,32%. Hal ini dipercaya terjadi akibat dari adanya pengaruh praktek politik pada pemilu 2009 lalu. Asumsi

ini dapat diyakini kebenarannya karena pada tahun 2010 (pasca pemilu) tingkat inflasi mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 3,56% menjadi 6,88%.

Inflasi mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Apabila tingkat inflasi meningkat, maka harga barang-barang dan jasa akhirnya juga akan naik, selanjutnya permintaan akan barang dan jasa akan turun, dan berakibat perusahaan akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan, sehingga jumlah angkatan kerja yang bekerja menurun. Jadi diduga tingkat inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja (Sadono Sukirno, 1994).

Selain inflasi, indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolok ukur secara makro adalah tingkat upah. Menurut Biro Pusat Statistik (Delfi Panjaitan, 1999) upah yang diterima tenaga kerja adalah uang atau barang yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai imbalan atas produktifitasnya terhadap perusahaan.

Ditinjau dari upah, selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Sehingga dalam hal ini, diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan tersebut (Badrun dalam Kemala, 2006).

Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnyatenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat

dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah.

Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditentukan, maka sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai tindakan efisiensi, yang berakibat pada rendahnya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja (Payaman J Simanjuntak, 2001). Pemberian upah minimum yang layak diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, namun bila ditinjau dari teori ekonomi klasik dan neoklasik bahwa penetapan upah minimum bukan dianggap kebijakan yang tepat. Menurut teori ini pasar tenaga kerja sama saja dengan pasar lainnya yang membutuhkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Bila upah minimum berada di atas upah riil maka akan terdapat surplus tenaga kerja. Dengan kata lain, dalam teori ini penetapan upah minimum pada dasarnya adalah investasi terhadap mekanisme pasar, dan setiap investasi terhadap mekanisme pasar akan menyebabkan ketidakefisienan.

Menurut Simanjuntak (2001) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat

dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan timbal balik dengan tingkat upah.

**Tabel 1.3**  
**Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah)**

	Kabupaten/Kota	2008		2009		2010	
		KHL	UMK	KHL	UMK	KHL	UMK
1	Kab. Cilacap	712.546,00	587.500,00	775.251,67	664.333,33	812.478,00	698.333,00
2	Kab. Banyumas	612.222,62	550.000,00	682.686,00	612.500,00	677.485,00	670.000,00
3	Kab. Purbalingga	686.995,92	560.000,00	719.476,00	618.750,00	803.022,00	695.000,00
4	Kab. Banjarnegara	649.044,27	551.000,00	730.344,00	637.000,00	794.548,00	662.000,00
5	Kab. Kebumen	626.939,95	550.000,00	733.974,48	641.500,00	786.360,00	700.000,00
6	Kab. Purworejo	623.319,36	555.000,00	710.834,51	643.000,00	795.453,00	719.000,00
7	Kab. Wonosobo	666.927,75	565.000,00	785.127,45	667.000,00	814.375,00	715.000,00
8	Kab. Magelang	662.400,00	610.000,00	789.500,00	702.000,00	835.867,00	752.000,00
9	Kab. Boyolali	642.387,00	622.000,00	729.400,00	718.500,00	752.737,00	748.000,00
10	Kab. Klaten	658.596,20	607.000,00	714.943,00	685.000,00	742.974,00	735.000,00
11	Kab. Sukoharjo	659.715,20	642.500,00	710.323,74	710.000,00	769.500,00	769.500,00
12	Kab. Wonogiri	618.020,00	585.000,00	683.311,06	650.000,00	739.374,00	695.000,00
13	Kab. Karanganyar	668.810,00	650.000,00	751.000,00	719.000,00	780.000,00	761.000,00
14	Kab. Sragen	640.286,58	607.500,00	721.603,00	687.000,00	728.663,00	724.000,00
15	Kab. Grobogan	627.717,17	555.000,00	729.138,69	640.000,00	809.474,00	687.500,00
16	Kab. Blora	675.000,00	624.000,00	710.546,00	675.000,00	760.890,00	742.000,00
17	Kab. Rembang	640.286,58	560.000,00	735.445,36	647.000,00	755.051,00	702.000,00
18	Kab. Pati	667.817,05	600.000,00	726.132,59	670.000,00	779.590,00	733.000,00
19	Kab. Kudus	684.679,06	672.500,00	764.064,69	750.694,00	786.910,00	775.000,00
20	Kab. Jepara	668.278,62	585.000,00	730.837,75	650.000,00	772.711,00	702.000,00
21	Kab. Demak	683.444,55	647.500,00	812.908,00	772.262,00	847.282,00	813.400,00
22	Kab. Semarang	737.376,92	672.000,00	862.290,27	759.360,00	894.968,00	824.000,00
23	Kab. Temanggung	614.158,47	547.000,00	769.808,99	645.000,00	800.875,00	709.500,00
24	Kab. Kendal	702.900,00	662.500,00	768.421,00	730.000,00	817.610,00	780.000,00
25	Kab. Batang	666.256,25	615.000,00	792.244,95	700.000,00	845.436,00	745.000,00
26	Kab. Pekalongan	682.266,77	615.000,00	762.886,00	700.000,00	836.511,00	760.000,00
27	Kab. Pemalang	668.996,38	575.000,00	731.225,79	630.000,00	765.622,00	675.000,00
28	Kab. Tegal	681.832,27	560.000,00	749.000,00	611.000,00	794.066,00	687.000,00
29	Kab. Brebes	737.498,31	547.000,00	793.693,96	575.000,00	857.290,00	681.000,00
30	Kota Magelang	661.120,54	570.000,00	751.166,88	665.000,00	826.643,00	745.000,00
31	Kota Surakarta	674.315,00	674.000,00	723.000,00	723.000,00	855.592,00	785.000,00
32	Kota Salatiga	711.034,15	662.500,00	780.766,84	750.000,00	803.185,00	803.185,00
33	Kota Semarang	715.679,65	715.000,00	838.508,86	838.500,00	939.756,00	939.756,00
34	Kota Pekalongan	660.642,00	615.000,00	806.723,00	710.000,00	839.516,00	760.000,00
35	Kota Tegal	648.150,12	560.000,00	701.336,00	600.000,00	798.000,00	700.000,00

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan UMK di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun. Tahun 2008 UMK tertinggi berada di kota Semarang (Rp 715.700,00). Hal ini disebabkan karena kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah banyak menyerap tenaga kerja baik di sektor pemerintah dan di sektor swasta. Kabupaten Brebes merupakan kabupaten dengan UMK terendah yaitu sebesar Rp 547.000,00. Tahun 2009 terjadi peningkatan UMK di masing-masing kota dengan UMK tertinggi masih berada di Kota Semarang yaitu sebesar Rp 838.500,00 dan UMK terendah juga berada di Kabupaten Brebes dengan Rp 575.000,00. Kota Semarang pada tahun 2010 masih menjadi kota yang memiliki UMK tertinggi yaitu sebesar Rp. 939.756,00 dan tahun 2010 UMK terendah terdapat di Kabupaten Banjarnegara.

Tingkat bunga merupakan salahsatu pedoman bagi investor yang digunakan sebagai pembandingan apakah investasi yang ditanamkan menguntungkan atau tidak. Jika tingkat *return* dari suatu investasi lebih rendah dari tingkat suku bunga maka dapat dikatakan bahwa investasi tersebut tidak menguntungkan. Jika tingkat bunga kredit investasi mengalami kenaikan, maka umumnya para pelaku bisnis akan menahan diri dalam melakukan investasi. Penurunan nilai investasi ini akan berdampak terhadap berkurangnya aktivitas usaha dari pelaku bisnis. Berkurangnya aktivitas usaha ini sekaligus juga akan berdampak terhadap berkurangnya penggunaan tenaga kerja.

Peranan kredit yang diberikan oleh perbankan di dalam pertumbuhan ekonomi dapat berarti penciptaan lapangan kerja, baik melalui perluasan produksi dan kegiatan usaha lainnya maupun melalui pengaruhnya dalam mendorong

munculnya unit-unit usaha baru. Selain itu, kredit perbankan dapat diarahkan untuk pemerataan kesempatan berusaha yang antara lain melalui alokasi pemberian kredit menurut prioritas pembangunan dan golongan ekonomi sehingga pada gilirannya dapat memperluas pemerataan hasil-hasil pembangunan. Permintaan kredit oleh pengusaha tidak akan meningkat apabila iklim investasi di daerah tidak mendukung. Dukungan terhadap iklim investasi dapat berasal dari pemerintah daerah. Saat ini banyak pengusaha yang mengeluh masalah sulitnya perizinan usaha dan banyaknya peraturan-peraturan daerah. Sulitnya mendapat perizinan dan banyaknya peraturan daerah (perda) menyebabkan sektor riil mengalami hambatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disediakan diatas, maka penulis ingin menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan judul **“Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar Dan Menengah di Jawa Tengah (35 Kab/Kota)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam data yang dirilis oleh BPS, diantara sembilan lapangan usaha Jawa Tengah, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB setelah sektor pertanian. Semakin besar kontribusi sektor industri terhadap perekonomian maka semakin kuat ekonomi wilayah tersebut. Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi, semakin besar modal yang ditanamkan, serta semakin tinggi tingkat output suatu industri, maka akan meningkatkan kesempatan kerja.

Masalah yang dihadapi sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah yaitu walaupun sektor ini memiliki investasi yang besar dan kontribusinya terhadap PDRB tinggi, namun tenaga kerja yang bekerja masih kecil. Maka berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Seberapa besar pengaruh tingkat upah terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Diantara upah minimum dan inflasi, variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis berapa besar pengaruh upah minimum terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menganalisis berapa besar pengaruh tingkat inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

- c. Menganalisis berapa besar pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Pusat dapat menjadi sumber informasi dalam memantau tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah
- b. Bagi pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan dalam pengambilan kebijakan sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah.
- c. Memberi referensi dan gambaran yang mungkin akan berguna dikalangan akademis dalam melanjutkan penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Sebagai bahan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta



beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran teori serta hipotesis penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang definisi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

### BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang dapat ditarik dari penelitian mengenai pengaruh variabel-variabel Upah, Inflasi, serta PMDN dan PMA terhadap kesempatan kerja industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Tengah tahun 2008-2010, serta saran dan rekomendasi dari penulis (peneliti) yang ditujukan kepada instansi atau pihak-pihak tertentu guna membantu penentuan kebijakan yang tepat sasaran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Ketenagakerjaan**

Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Human Resources* mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja.

Usia kerja adalah orang yang mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja tersebut dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*. Secara singkat, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (Payaman J Simanjuntak, 1985).

Menurut Sitanggang dan Nachrowi (2004) ada dua pengertian tenaga kerja, yakni pertama tenaga kerja umumnya tersedia di pasar kerja, dan biasanya siap untuk digunakan dalam suatu proses produksi barang dan jasa. Kemudian perusahaan atau penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar kerja. Apabila tenaga kerja tersebut bekerja, maka mereka akan mendapat imbalan jasa berupa upah atau gaji. Dan yang kedua, tenaga kerja terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar, di satu sisi

merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat diandalkan, tetapi di sisi lain juga merupakan masalah besar yang berdampak pada berbagai sektor.

Berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja menurut Badan Pusat Statistik (2008) dan sesuai dengan yang disarankan oleh *International Labor Organization* (ILO) adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja (*labor force*) dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*labor force*) terdiri dari dua golongan yaitu golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur/mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan yaitu golongan yang bersekolah; golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya (Payaman J Simanjuntak, 1985).

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang/jasa atau mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang mencari kerja (Mulyadi Subri, 2003).

### **2.1.1.1 Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan tenaga kerja timbul sebagai akibat dari permintaan konsumen atas barang dan jasa, sehingga permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) (Payaman, 2001:89). Menurut Arfida BR. (2003:62) menyatakan pengaruh output terhadap permintaan tenaga kerja dimulai dari penurunan upah pasar. Turunnya upah pasar akan mengakibatkan biaya produksi perusahaan akan mengalami penurunan. Dalam pasar persaingan sempurna, jika diasumsikan harga produk konstan, maka penurunan biaya ini akan menaikkan kuantitas output yang memaksimalkan keuntungan. Untuk alasan tersebut perusahaan akan memperluas penggunaan tenaga kerja (Juhari dan Hastarini, 2009).

### **2.1.1.2 Penawaran Tenaga Kerja**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Juhari dan Hastarini (2009), pengertian penawaran terhadap pekerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah satuan pekerja yang disetujui oleh penyuplai untuk ditawarkan. Secara khusus kurva penawaran tenaga kerja yang dimaksud adalah menggambarkan berbagai kemungkinan tingkat upah dan jumlah maksimum satuan pekerja yang ditawarkan oleh penyuplai pekerja pada waktu tertentu (Aris Ananta, 1990:27). Arfida BR. (2003:64) menyebutkan jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang memilih masuk dalam angkatan kerja dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Lebih lanjut, masing-masing dari

ketiga komponen ini dari jumlah tenaga kerja keseluruhan yang ditawarkan tergantung pada upah pasar.

### 2.1.1.3 Fungsi Produksi

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lainnya khususnya modal akan dapat menghasilkan suatu output berupa barang dan jasa. Oleh karena itu rumah tangga perusahaan dalam kegiatan menghasilkan produksinya membutuhkan atau meminta jasa tenaga kerja. Dengan suatu asumsi, perusahaan dalam menghasilkan *outputnya* menggunakan faktor tenaga kerja dan modal (dalam jangka pendek), di mana faktor modal jumlahnya tetap, maka secara matematis fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Q = f(L, K) \dots \dots \dots (2.1)$$

Dimana:

Q = Jumlah *output* yang dihasilkan

L = Jumlah sumber tenaga kerja (jasa tenaga kerja)

K = Jumlah sumber modal (jasa barang modal)

### 2.1.2 Kesempatan Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi selain tanah, modal dan lain-lain karena manusia merupakan penggerak bagi seluruh faktor-faktor produksi tersebut. Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian pengertian kesempatan kerja

adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan kerja secara nyata sulit diperoleh, maka untuk keperluan praktis digunakan pendekatan bahwa jumlah kesempatan kerja didekati melalui banyaknya lapangan kerja yang terisi yang tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja (Nainggolan, 2009).

Menurut Payaman (dalam Juhari dan Hastarini, 2009) penambahan produktivitas kerja dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dimana akan terjadi perubahan permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang melalui:

1. Peningkatan produktivitas kerja dengan jumlah hasil produksi yang sama diperlukan tenaga kerja dengan jumlah yang lebih sedikit.
2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diperoleh atas keberhasilan penurunan biaya produksi per-unit, sehingga dapat menurunkan harga jual, kemudian diikuti dengan bertambahnya permintaan akan produksi tersebut. Hal ini akhirnya mendorong pertumbuhan akan produksi yang akan menambah permintaan tenaga kerja.
3. Upah pekerja bertambah besar sehubungan dengan peningkatan produktivitas kerja. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli pekerja, sehingga permintaan akan barang-barang konsumsi bertambah juga. Kondisi ini

pada akhirnya akan mendorong peningkatan produksi barang. Sehingga hal ini akan meningkatkan permintaan tenaga kerja.

### **2.1.3 Upah Tenaga Kerja**

#### **2.1.3.1 Pengertian Upah**

Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Sebagai salah satu dari barometer di dalam pengukuran-pengukuran berbagai macam kesejahteraan, maka pemerintah berperan aktif untuk mengaturupah. Pemerintah telah mengatur Upah Minimal Kota/Kabupaten (UMK). Di berbagai propinsi ternyata penetapan upah minimum berbeda-beda, baik besarnya, persentase kenaikan setiap tahun, sistem penetapannya dan ruang lingkup yang ditetapkan. Beberapa provinsi menetapkan upah minimum tunggal dan sebagian provinsi lainnya menetapkan upah minimum sektoral. Upah minimum tunggal bersifat kaku, umumnya berdampak kepada perbaikan upah pekerja tetap pada industri marginal. Beberapa provinsi di Indonesia menetapkan upah minimum sektoral dengan derajat yang kurang bervariasi sampai sangat bervariasi, seperti provinsi Sumatera Utara dan provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa provinsi seperti provinsi DKI Jakarta dan provinsi Jawa Tengah sering menetapkan upah sektoral tetapi pada tahun yang lain dihapuskan kemudian ditahun berikutnya upah sektoral tersebut muncul lagi (Setiaji dan Sudarsono, 2004).

Menurut Arfida BR (dalam Juhari dan Hastarini, 2009) pengaruh output terhadap permintaan tenaga kerja dimulai dari penurunan upah pasar. Turunnya upah pasar, biaya produksi perusahaan akan mengalami penurunan. Dalam pasar persaingan sempurna, jika diasumsikan harga produk konstan, maka penurunan biaya ini akan menaikkan kuantitas output yang memaksimalkan keuntungan. Untuk alasan tersebut perusahaan akan memperluas penggunaan tenaga kerja.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpendapatan rendah (Tjiptoherijanto, 1990).



### **2.1.3.2 Fungsi Upah Minimum**

Menurut Taufik Zamrowi (2007), fungsi upah secara umum terdiri dari:

1. Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia; menggunakan sumber daya tenaga manusia secara efisien; mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

2. Untuk mengalokasikan secara efisien sumber daya manusia. Sistem pengupahan (kompensasi) bertujuan untuk menarik dan menggerakkan tenaga kerja kearah produktif, mendorong tenaga kerja produktif ke pekerjaan yang lebih produktif.

3. Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien, cara untuk mendapatkan pembayaran upah (kompensasi) yang relatif tinggi adalah mendorong manajemen memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari pemakaian tenaga kerja. Tenaga kerja mendapat upah (kompensasi) sesuai dengan keperluan hidupnya.

4. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem pengupahan (kompensasi) diharapkan dapat merangsang, mempertahankan stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum**

Secara empiris ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum, yaitu:

a. **Kebutuhan Fisik Minimum**

Adalah kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah maupun dari segi mutu barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi seperti makan, minum, bahan bakar, perumahan, pakaian, dll.

b. **Indeks Harga Konsumen**

Merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung mencerminkan tingkat inflasi. Data IHK mencakup 160 jenis barang yang dibagi menjadi empat kelompok pengeluaran, yaitu: makanan, sandang, perumahan dan aneka.

c. **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, maka semakin besar pula kesempatan berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. (Tjiptoherijanto, 1990)

## **2.1.4 Inflasi**

### **2.1.4.1 Pengertian Inflasi**

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan yang dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah inflasi. Boediono (1999) menyatakan bahwa

definisi singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus.

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga karena musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai masalah atau "penyakit" ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan khusus untuk menanggulangnya.

Sedangkan Sukirno (2002) menyatakan bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian.

#### **2.1.4.2 Penggolongan Inflasi**

Boediono (1999) menyatakan bahwa ada berbagai cara untuk menggolongkan jenis-jenis inflasi, dan penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita.

Penggolongan pertama didasarkan atas "parah" tidaknya inflasi tersebut.

Di sini kita bedakan beberapa jenis inflasi:

1. Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
2. Inflasi sedang (antara 10 -- 30% setahun)
3. Inflasi berat (antara 30 - 100% setahun)
4. Hiperinflasi (di atas 100% setahun).

Penentuan parah tidaknya inflasi tentu saja sangat relatif dan tergantung pada selera kita untuk menamakannya. Sebenarnya pasar dan para pelaku ekonomi tidak bisa menentukan parah tidaknya suatu inflasi hanya dari sudut laju inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang menanggung beban atau yang memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. Seandainya laju inflasi adalah 20% dan semuanya berasal dari kenaikan harga barang yang dibeli oleh golongan yang berpenghasilan rendah, maka inflasi itu sudah tergolong inflasi berat.

Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab musabab awal dari inflasi. Atas dasar ini dibedakan dua jenis inflasi:

1. Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang yang terlalu besar. Inflasi semacam ini disebut *demand inflation*.
2. Inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Inflasi ini disebut *cost inflation*.

Jika permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah, misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, akan mengakibatkan harga barang umum naik. Bila ongkos produksi naik, misalnya karena kenaikan harga, sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak, maka akibat dari kedua macam inflasi tersebut dari segi kenaikan harga output tidak berbeda, tetapi dari segi volume output (GDP riil) terdapat perbedaan. Dalam kasus *demand inflation*, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) naik bersama-sama dengan

kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini tergantung kepada elastisitas kurva *aggregate supply*; biasanya semakin mendekati output maksimum semakin tidak elastis kurva ini. Sebaliknya dalam kasus *cost inflation*, biasanya kenaikan harga-harga dibarengi dengan penurunan omzet penjualan barang (kelesuan usaha). Perbedaan yang lain dari kedua proses inflasi ini terletak pada urutan dari kenaikan harga. Dalam *demand inflation* kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya). Sebaliknya dalam *cost inflation*, bahwa kenaikan harga barang-barang akhir (*output*) mengikuti kenaikan harga barang-barang *input*/faktor produksi. Kedua jenis inflasi ini jarang sekali dijumpai prakteknya dalam bentuk yang murni. Pada umumnya, inflasi yang terjadi di berbagai negara di dunia adalah kombinasi dari kedua jenis inflasi tersebut dan seringkali keduanya saling memperkuat satu sama lain.

Penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan asal dari inflasi yang dibedakan menjadi, yaitu: penggolongan inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Inflasi yang berasal dari dalam negeri terjadi misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga yang mempunyai hubungan perdagangan antar negara.

Adapun kenaikan harga barang-barang yang diimpor memiliki dampak sebagai berikut:

- a. Secara langsung mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup, karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor
- b. Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi yang kemudian, harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor (*cost inflation*),
- c. Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga didalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah/swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand inflation*).

Menurut Boediono (2002) bahwa "penularan" inflasi dari luar negeri ke dalam negeri bisa lewat kenaikan harga barang-barang ekspor, dan saluran-salurannya hanya sedikit berbeda dengan penularan lewat kenaikan harga barang-barang impor. Contoh:

1) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kopi, teh) naik, maka indeks biaya hidup akan naik sebab barang-barang ini langsung masuk dalam daftar barang yang tercakup dalam indeks harga.

2) Bila harga barang-barang ekspor (seperti kayu, karet, timah, dan sebagainya) naik, maka ongkos produksi dari barang-barang yang menggunakan barang-barang tersebut dalam produksinya (perumahan, sepatu, kaleng dan sebagainya) akan naik, kemudian harga jualnya akan naik (*cost inflation*).

3) Kenaikan harga barang-barang ekspor berarti kenaikan penghasilan eksportir (dan juga para produsen barang-barang ekspor tersebut). Kenaikan

penghasilan ini kemudian akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang (dalam maupun luar negeri).

4) Bila jumlah barang yang tersedia di pasar tidak bertambah, maka harga-harga barang lain juga akan naik (demand inflation).

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri jelas lebih mudah terjadi di negara-negara yang perekonomiannya terbuka, yaitu yang sektor perdagangan luar negerinya penting (seperti Indonesia, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia dan sebagainya). Namun seberapa jauh penularan tersebut akan terjadi, tergantung kepada kebijaksanaan pemerintah. Melalui kebijakan moneter dan fiskal yang dibuat oleh pemerintah, bisa menetralsir kecenderungan inflasi yang berasal dari luar negeri tersebut.

Menurut Sukirno (2008) bahwa berdasarkan jenisnya inflasi dapat dibedakan menjadi :

a. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi akan menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya mengakibatkan pengeluaran yang melebihi kemampuan pasar untuk menyediakan barang dan jasa. Pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan barang dan jasa yang bertambah, maka perusahaan

itu akan berusaha menaikkan produksinya dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari tenaga kerja baru dengan tawaran upah yang tinggi juga. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga berbagai barang (inflasi).

Selanjutnya Boediono (1999) menyatakan bahwa dalam prakteknya untuk mengetahui penyebab timbulnya inflasi (terutama inflasi yang kronis atau yang telah berjalan lama) dan merumuskan dan kemudian melaksanakan kebijaksanaan untuk menanggulangnya adalah masalah yang suli dan pelik. Pemecahan penyebab timbulnya inflasi harus meliputi ilmu ekonomi dan bidang sosiologi dan politik. Karena masalah inflasi dalam arti yang lebih luas bukan semata-mata karena masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosio-ekonomi-politis. Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai penyebab terjadinya inflasi, yaitu:

1. Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar, dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectations*). Inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi hanya bisa terjadi apabila ada penambahan volume uang yang beredar (baik penambahan uang kartal maupun penambahan uang giral). Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar di masyarakat misalnya, terjadi kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Penambahan jumlah uang itu ibarat "bahan bakar" bagi api inflasi. Bila jumlah uang tidak bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya.



b. Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan pengaruh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada tiga kemungkinan, yaitu pertama, bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang yang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya. Yaitu, memperbesar pos kas dalam buku neraca para anggota masyarakat. Ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Kedua, bila masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan/tahun sebelumnya) mulai sadar bahwa terjadi inflasi maka masyarakat mulai mengharapkan kenaikan harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah pos kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang (memperbesar pos aktiva barang-barang di dalam neraca). Ketiga, keadaan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keengganan untuk memegang uang kas dan keinginan membelanjakannya untuk membeli barang begitu uang kas tersebut diterima menjadi semakin meluas di kalangan masyarakat.

## 2. Teori Keynes

Teori Keynes menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangannya tidak lain adalah proses perebutan rejeki (materi) diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan

bagian yang lebih besar daripada yang tersedia. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*). *Inflationary gap* ini timbul karena golongan-golongan masyarakat tersebut berhasil merealisasikan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang dan jasa.

### 3. Teori Strukturalis

Teori Strukturalis adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian yang menurut definisinya faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang, maka teori ini bisa disebut teori inflasi "jangka panjang". Dengan perkataan lain, yang dicari adalah faktor-faktor jangka panjang manakah yang biasa mengakibatkan inflasi yang berlangsung lama. Menurut teori Strukturalis, ada dua ketegaran (*inflexibilities*) yang utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi.

1. Ketegaran yang pertama berupa "ketidak-elastisan" dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena pertama, di pasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan dibanding dengan harga barang-barang impor yang harus dibayar, atau sering disebut dengan istilah dasar penukaran (*terms of trade*) yang

makin memburuk. Kedua, *supply* atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap kenaikan harga (tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun untuk investasi). Akibatnya, negara tersebut yang berusaha sesuai dengan rencana pembangunannya untuk mencapai target pertumbuhan tertentu terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimpor (*import substitution strategy*), meskipun seringkali produksi dalam negeri tersebut mempunyai ongkos produksi yang lebih tinggi (dan sering pula dengan kualitas yang lebih rendah) dari barang-barang sejenis yang diimpor.

2. Ketegaran yang kedua berkaitan dengan "ketidak-elastisan" dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Dikatakan bahwa produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertambahan penduduk dan penghasilan perkapita, sehingga harga bahan makanan di dalam negeri cenderung untuk naik melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (di sektor industri) untuk memperoleh kenaikan upah/gaji. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi, yang berarti pula kenaikan harga dari barang-barang olahan tersebut.

## **2.1.5 Investasi**

### **2.1.5.1 Pengertian Investasi**

Investasi dapat diartikan sebagai biaya pengeluaran untuk penanaman modal atau pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang, modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi

barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno dalam Mudaram 2011).

Menurut Boediono (1992) investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (pemerintah dan swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.

Teori Dornbusch & Fischer menyatakan bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan/menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang.

Selanjutnya menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja; meningkatkan pendapatan nasional; dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

## **2.1.6. Hubungan Antara Variabel Dependen terhadap Variabel Independen**

### **2.1.6.1. Hubungan Upah terhadap Kesempatan Kerja**

Upah bagi pengusaha dapat dipandang sebagai beban, karena semakin besar upah yang dibayarkan kepada karyawan, semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha (Simanjuntak, 1985).

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal berikut ini (Sumarsono, 2003) :

a. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak mau membeli barang yang bersangkutan. Artinya banyak produksi yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

b. Apabila tingkat upah naik, (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah) maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect (capital intensive)*.

Menurut Kuncoro (2002), kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja

yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

#### **2.1.6.2. Hubungan Inflasi terhadap Kesempatan Kerja**

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap kesempatan kerja. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva philips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.

Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). (Sukirno, 2004)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dijelaskan secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah *summary* dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

1. Eva Sari Kemala (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja pada Industri Besar dan Menengah di Sumatera Selatan” dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda dan metode OLS. Variabel penelitian ini adalah kesempatan kerja, investasi, dan tingkat upah. Penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing kelompok industri yang ada pada industri besar dan menengah mempunyai *slope* dan *intersept* yang berbeda.

2. Rezal Wicaksono (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Indonesia tahun 1990-2008”. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini memakai penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen dan variabel independen diantaranya: PDB sektor industri, upah riil, dan suku bunga riil. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji T menunjukkan bahwa PDB sektor industri signifikan dan berpengaruh positif; upah riil signifikan dan berpengaruh positif; suku bunga riil tidak berpengaruh signifikan dan jumlah unit usaha tidak berpengaruh secara signifikan. Dari

keempat variabel tersebut variabel upah riil adalah yang paling berpengaruh. Pada uji F bahwa variabel PDB sektor industri, upah riil, suku bunga riil dan jumlah unit usaha menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan sedang dan besar di Indonesia.

3. Delfi Panjaitan (2003) dalam penelitiannya “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan” menggunakan variabel permintaan tenaga kerja dan tingkat upah. Alat analisis penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan metode OLS menyimpulkan bahwa: variabel upah berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Dimana upah memiliki koefisien yang positif yaitu sebesar  $1,15E-06$ . Besaran koefisien upah yaitu  $1,15E-06$  dengan asumsi faktor lain dalam model di atas tidak berubah maka koefisien tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila jumlah upah meningkat sebesar 1 persen akan mempunyai pengaruh terhadap pertambahan permintaan tenaga kerja pada industri kecil di provinsi Sumatera Selatan sebesar  $1,14E-06\%$ .

4. M. Taufik Zamrowi (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri kecil” dengan menggunakan variabel tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal kerja, pengeluaran tenaga kerja non-upah, dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan metode OLS. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa pengaruh keempat variabel itu terhadap penyerapan tenaga kerja cukup besar yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang tinggi yaitu sebesar 0,741. Dengan demikian variasi perubahan penyerapan tenaga kerja pada industri



kecil di kota Semarang sebesar 74,1% dijelaskan oleh variabel unit usaha, modal, dan tingkat upah/gaji. Sedangkan sisanya 25,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

5. Rimmar Siringo-ringo (2007) dalam tesisnya yang berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja pada industri menengah dan besar di Sumatera Utara”. Variabel dependennya adalah kesempatan kerja. Variabel independen adalah tingkat upah, tingkat bunga dan PDRB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat upah, tingkat bunga, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja (L) pada industri manufaktur besar dan sedang di Sumatera Utara sebesar 74%. Secara parsial, ketiga variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dimana tingkat bunga merupakan variabel yang paling berpengaruh).

Hasil penelitian terdahulu diuraikan pada Tabel dibawah ini

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metologi Penelitian	Hasil Penelitian
Eva Sari Kemala, 2006. (Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja Pada Industri Besar dan Menengah di Sumatera Selatan)	Data: sekunder. Variabel dependen : Kesempatan Kerja. Variabel independen : a. investasi b. upah Alat Analisis: analisis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing kelompok industri yang ada pada industri besar dan menengah mempunyai <i>slope</i> dan <i>intersept</i> yang berbeda. Investasi mempunyai pengaruh positif terhadap kesempatan kerja, dan secara umum tingkah upah mempunyai pengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

	regresi linear berganda, dengan metode OLS	
Rezal Wicaksono, 2010. (Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil, Suku Bunga Riil, dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990-2008)	Data: sekunder. Variabel dependen : Penyerapan Tenaga Kerja. Variabel independen : a. PDB Sektor Industri b. upah riil c. suku bunga riil d. jumlah unit usaha Alat Analisis: analisis regresi linear berganda dengan metode OLS	Hasil analisis data menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil uji T menunjukkan bahwa PDB sektor industri signifikan dan berpengaruh positif, upah riil signifikan dan berpengaruh positif, suku bunga riil tidak berpengaruh signifikan dan jumlah unit usaha tidak berpengaruh secara signifikan. Dari keempat variabel tersebut, variabel upah riil adalah yang paling berpengaruh. Pada uji F bahwa variabel PDB sektor industri, upah riil, suku bunga riil dan jumlah unit usaha menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan sedang dan besar di Indonesia
Delfi panjaitan, 2003 (Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil di Provinsi Sumatera Selatan)	Data: sekunder. Variabel dependen: Permintaan Tenaga Kerja. Variabel independen: upah Alat Analisis: analisis regresi linear berganda dengan metode OLS	Variabel upah berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Dimana upah memiliki koefisien yang positif yaitu sebesar 1,15E-06. Besaran koefisien upah yaitu 1,15E-06 dengan asumsi faktor lain dalam model diatas tidak berubah maka koefisien tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila jumlah upah meningkat sebesar 1 persen akan mempunyai pengaruh terhadap pertambahan permintaan tenaga kerja pada industri kecil di provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,14E-06%.
Rimmar Siringo-ringo.2007. (Analisis faktor-faktor yang	Jenis data: sekunder. Variabel dependen: kesempatan	Tingkat upah, tingkat bunga, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja (L) pada industri manufaktur besar dan sedang di Sumatera Utara sebesar 74%. Secara

mempengaruhi kesempatan kerja pada industri menengah dan besar di Sumatera Utara)	kerja. Variabel independen: Upah, tingkat bunga, PDRB	parsial, ketiga variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dimana tingkat bunga merupakan variabel yang paling berpengaruh.
M. Taufik Zamrowi, 2007. (Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri kecil)	Jenis data: sekunder Variabel independen: tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal kerja dan pengeluaran tenaga kerja non upah. Variabel dependen: Penyerapan tenaga kerja. Alat Analisis: analisis regresi linear berganda, dengan metode OLS	Variabel upah, produktivitas, modal dan non upah berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil mebel di Kota Semarang. Pengaruh keempat variabel tersebut cukup besar yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang tinggi, yaitu sebesar 0,741. Dengan demikian variasi perubahan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di Kota Semarang sebesar 74,1% dijelaskan oleh variabel unit usaha, modal, dan tingkat upah/gaji. Sedangkan sisanya 25,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

### 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

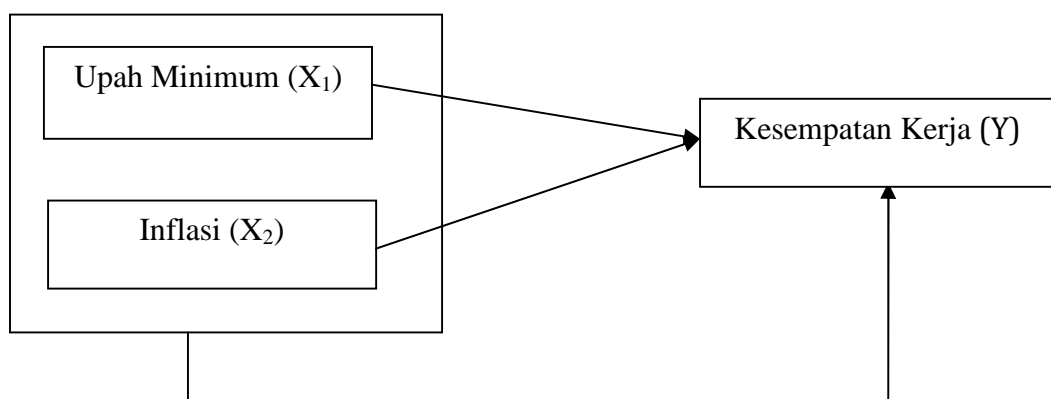
Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang maupun barang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik, sedangkan input lainnya tetap, maka mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang harganya relatif mahal dengan input-

input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Inflasi pada umumnya adalah kenaikan harga barang-barang secara terus-menerus. Gejala inflasi ditandai dengan banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat. Masalah inflasi dapat terjadi di pasar barang maupun di pasar uang.

Berdasarkan asumsi bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi kesempatan kerja industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Tengah adalah upah minimum dan inflasi, maka dapat disusun kerangka pemikiran seperti pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## 2.4 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat atau teori yang masih kurang sempurna. Dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan yang belum final, dalam arti masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Selanjutnya hipotesis dapat diartikan juga sebagai dugaan pemecahan masalah yang bersifat sementara

yakni pemecahan masalah yang mungkin benar dan mungkin salah (Hadari Nawawi, 2001).

Berdasarkan hal diatas maka dalam penelitian ini akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga ada pengaruh dan signifikan dari upah minimum terhadap kesempatan kerja pada sektor industri besar dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga ada pengaruh dan signifikan dari tingkat inflasi terhadap kesempatan kerja pada sektor industri besar dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diantara upah minimum dan inflasi, variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah?

### **3.1.2.2 Variabel Independen**

Variabel independen disebut juga variabel bebas. Penulis menggunakan tiga variabel bebas dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

#### **1. Upah Minimum ( $X_1$ )**

Upah adalah biaya tenaga kerja yang dibayarkan kepada pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan terhadap pemberi kerja. Dalam penelitian ini upah yang digunakan adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah per tahun yang diterima oleh pekerja dengan satuan rupiah pada tahun 2008 s/d 2010 yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah (DISNAKERTRANSDUK).

#### **2. Inflasi ( $X_2$ )**

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi besarnya tingkat kesempatan kerja yang terjadi. Tingkat inflasi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu (Sadono Sukirno, 1994). Tingkat inflasi yang digunakan pada penelitian ini adalah besarnya inflasi yang terjadi di 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 s/d 2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Mudrajad Kuncoro, 2001).

Sumber data penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel untuk kurun waktu 2008-2010.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat dokumenter, yaitu proses pengumpulan data dari data atau dokumen yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan seperti BPS, dinas terkait dan sumber-sumber lain yang membahas mengenai masalah-masalah penyerapan tenaga kerja seperti media cetak, jurnal ekonomidan buku-buku tentang tenaga kerja.

### 3.4 Metode Analisis

Untuk menaksir fungsi regresi populasi (PRF) atas dasar fungsi regresi sampel (SRF) seakurat mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (OLS). Metode kuadrat terkecil dikemukakan oleh Carl Frederich Gauss, yaitu seorang ahli matematika yang berasal dari Jerman (Gujarati:2003). Dengan asumsi-asumsi tertentu, metode OLS mempunyai beberapa sifat statistik yang diperlukan sebagai alat regresi untuk penaksiran maupun pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa dilakukan melalui pengujian secara serempak maupun secara parsial.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi dengan menggunakan metode regresi kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan formula sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu_i \dots \dots \dots (3.1)$$

Kemudian persamaan di atas ditransformasikan kedalam bentuk logaritma natural menjadi :

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_2 + \mu_i \dots \dots \dots (3.2)$$

Keterangan:

LnY: Kesempatan kerja industri pengolahan skala besar dan sedang di Jawa Tengah

$\beta_0$ : Konstanta

$\beta_1$ : Koefisien Tingkat Upah

$\beta_2$ : Koefisien Inflasi

$X_1$ : Upah minimum industri pengolahan skala besar dan sedang

$X_2$ : Inflasi industri pengolahan skala besar dan sedang

$\mu_i$ : Kesalahan pengganggu

Keunggulan melakukan transformasi kedalam bentuk logaritma yakni untuk mengurangi adanya gejala heterokedastisitas dan mengetahui kepekaan antar variabel. Seringkali transformasi logaritma akan mengurangi heterokedastisitas. Hal ini disebabkan karena transformasi logaritma memampatkan skala untuk pengukuran variabel, mengurangi perbedaan antara kedua nilai dari sepuluh kali lipat menjadi perbedaan dua kali lipat. Manfaat tambahan dari transformasi logaritma adalah bahwa koefisien kemiringan  $\beta$  mengukur elastisitas dari Y sebagai variabel dependen terhadap X sebagai variabel independen, yaitu ukuran persentase perubahan dalam Y bila diketahui persentase perubahan dalam X (Gujarati, 2003).



### 3.4.1 Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Metode *Ordinary Least Square* (OLS) merupakan model yang berusaha untuk meminimalkan penyimpangan hasil perhitungan (regresi) terhadap kondisi *actual*. Dibandingkan dengan metode lain, *Ordinary Least Square* merupakan metode sederhana yang digunakan untuk melakukan regresi linier terhadap sebuah model. Sehubungan dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter penduga yang lebih baik, maka pengujian model terhadap asumsi klasik harus dilakukan. Uji penyimpangan asumsi klasik tersebut terdiri dari:

#### 3.4.1.1 Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data suatu penelitian, salah satu alat yang digunakan adalah uji *kolmogrov Smirnov*. Menurut Ghozali (2003), bahwa distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan antara  $Z_{hitung}$  dengan  $Z_{tabel}$ . Jika hasil uji normalitas melebihi 0.05 ( $\alpha$ ) maka dapat dinyatakan bahwa data tersebut adalah normal. Selain itu juga bisa dilihat dari grafik plot.

#### 3.4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel dari model regresi tersebut, jika terdapat multikolinieritas maka pengaruh masing-masing variabel secara individu tidak dapat di deteksi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dalam model regresi antara lain dapat dilakukan dengan nilai  $R^2$  yang dihasilkan dari model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (Gujarati, 1995) langkah menganalisis asumsi multikolinieritas yaitu:

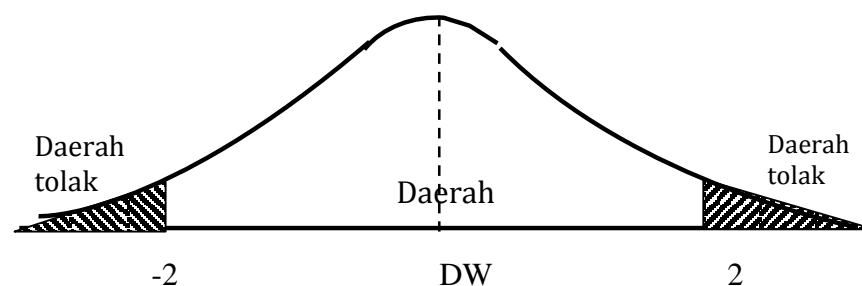
- Jika nilai VIF  $< 10$  maka tidak terjadi problem multikolinieritas
- Jika nilai Toleran  $> 0,10$  maka Tidak terjadi problem multikolinieritas

### 3.4.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.

Pengujian ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan uji Durbin Watson (uji DW) dengan bantuan program SPSS.

**Gambar 3.1**  
**Kriteria Pengujian Durbin-Watson**



Sumber: Wing Wahyu Wonarno, 2007

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan *Durbin-Watson Test*, Adapun mekanisme tes Durbin Watson adalah sebagai berikut:

- Angka D-W di bawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W di antara  $-2$  sampai  $+2$ , berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W di atas  $+2$  berarti ada autokorelasi negatif.

#### 2.4.1.4 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji F dapat menjadi tidak berguna (*misleading*). Regresi linier klasik mengasumsikan tidak ada heterokedesitas. Heterokedesitas dalam penelitian di deteksi dengan menggunakan uji Glejser dan grafik Plot antara variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 2.4.2 Uji Statistik

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Koefisien Determinasi (Uji  $R^2$ ), Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-Sama (Uji F), dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T).

##### 1.4.2.1 Pengujian Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi (*goodness of fit*) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman, 2006).

Menurut Gujarati (2003) nilai  $R^2$  berkisar antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ).

Keterangan:

1. Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen terbatas.

2. Nilai  $R^2$  mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel independen, dan modal tersebut dapat dikatakan baik.

#### 1.4.2.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)

Uji ini pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat dengan cara:

1. Menentukan hipotesis yang akan diuji ( $H_0$  dan  $H_a$ ).
2. Menentukan *level of significance* ( $\alpha$ ) tertentu.
3. Menentukan kriteria pengujian dengan membandingkan nilai F-tabel dan F-hitung.
4. Menarik kesimpulan.

Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, dimana nilai F hitung dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$F \text{ Hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2)/(n-k)} \dots\dots\dots(3.3)$$

Keterangan:

1.  $R^2$  = Koefisien determinasi
2.  $n$  = Jumlah observasi
3.  $k$  = jumlah variabel penjelas termasuk konstanta

Pengambilan keputusan:

1. Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara signifikan.

2. Sebaliknya apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara signifikan.

### 3.4.2.3 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji T)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen (Mudrajad Kuncoro, 2001). Nilai hitung t dapat diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$T_{hitung} = \frac{\beta_1}{se(\beta_2)} \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan:

$\beta_1$  : koefisien regresi

$se(\beta_2)$  : standar *error* koefisien regresi

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- $H_0 : \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  maka variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.
- $H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  maka variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan:

1. Apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, berarti variasi variabel independen (X) mampu mempengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan.

2. Sebaliknya jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, berarti variasi variabel independen (X) tidak mampu mempengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Secara umum variabel penelitian dibagi menjadi dua yaitu variabel dependen dan variabel independen. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan skala besar dan sedang di Jawa Tengah sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah upah minimum dan inflasi.

##### **3.1.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur. Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

###### **3.1.2.1 Variabel Dependen**

###### **Kesempatan Kerja(Y)**

Kesempatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan industri pengolahan skala besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah baik tenaga kerja produksi (pekerja yang pekerjaannya langsung bekerja didalam proses produksi dari mulai bahan baku masuk ke pabrik sampai menjadi hasil produksi yang keluar dari pabrik) maupun tenaga kerja lainnya dan diukur dengan satuan orang.